

**EVALUASI PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN  
PANGANDARAN**  
**(Studi pada Bank Sampah Induk Sahate Kabupaten  
Pangandaran)**

**Ilham<sup>1</sup>, Imam Maulana Yusuf<sup>2</sup>, Ahmad Juliarso<sup>3</sup>**

*Universitas Galuh Ciamis<sup>1,2,3</sup>*

**ABSTRAK**

*Penelitian ini dilatarbelakangi adanya masalah berkaitan dengan evaluasi pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran pada Bank Sampah Induk Sahate Kabupaten Pangandaran yang sudah dijalankan namun belum maksimal. Hal ini terlihat dari beberapa indikator masalah pada kriteria evaluasi, diantaranya: belum optimalnya hasil dari adanya program Bank Sampah, hasil dari pengelolaan sampah belum dapat memecahkan permasalahan dalam pengurangan dan penanganan sampah, belum meratanya pengadaan atau pendirian Bank Sampah Unit di setiap desa, dan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai: evaluasi pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran pada Bank Sampah Induk Sahate Kabupaten Pangandaran. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif bersifat deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori menurut Subyantoro dan Dunn dalam Nugroho (2014:713) bahwa kriteria evaluasi kebijakan yaitu: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari 8 orang informan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa evaluasi pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran pada Bank Sampah Induk Sahate Kabupaten Pangandaran sudah dijalankan namun belum maksimal. Hal ini terlihat dari rata-rata jawaban informan pada 6 dimensi yang dijadikan alat ukur penelitian, terdapat 5 dari 6 dimensi evaluasi yang masih belum menunjukkan belum optimalnya kegiatan evaluasi, diantaranya dimensi: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas.*

**Kata Kunci:** *Evaluasi, Pengelolaan, dan Sampah*

**PENDAHULUAN**

Sampah merupakan salah satu masalah di berbagai daerah yang memang memerlukan penanganan dan pengelolaan secara baik dan

professional sehingga akan tercermin kota atau daerah yang semakin tertata rapih. Namun sebaliknya, pengelolaan sampah yang kurang baik akan menyebabkan berbagai masalah

seperti: bau busuk, tata kota yang tidak rapih, penyakit, dan lain sebagainya (Rendy, 2015). Buruknya penanganan sampah, umumnya disebabkan oleh buruknya tata kelola sampah. Tata kelola sampah tersebut meliputi perencanaan, penganggaran, evaluasi dan monitoring. Dibutuhkan kesadaran dan komitmen bersama menuju perubahan sikap, perilaku dan etika yang berbudaya lingkungan (Thamrin dkk, 2022).

Pemerintah daerah sebagai pihak yang berwewenang dalam pengelolaan sampah memiliki tanggung jawab yang besar dalam menyelesaikan persoalan pengelolaan sampah di daerahnya masing-masing baik itu dalam pengelolaan sampah didaerahnya masing-masing baik itu dalam hal strategi pengelolaan, izin pengelola, dan permasalahan volume sampah. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai landasan dari pengelolaan sampah ditekankan bahwa sampah telah menjadi permasalahan Nasional sehingga pelaksanaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir sehingga memberikan mamfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran salah satu strategi dalam pengelolaan sampah adalah dengan sistem 3R yaitu *Reduse*, *Reuse*, dan *Recycle*. Program yang dilaksanakan dalam upaya pengurangan dan

penanganan sampah di Kabupaten Pangandaran yaitu melalui program Bank Sampah.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Pangandaran selaku salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Kabupaten Pangandaran memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah diamanatkan pula bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan evaluasi kinerja pengelolaan sampah oleh Bank Sampah berdasarkan laporan. Begitupun halnya dalam Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah bahwa Bupati melalui SKPD yang membidangi persampahan diharuskan melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan sampah. Maka demikian, kegiatan evaluasi merupakan suatu hal yang penting untuk dapat memberikan jawaban apakah pengelolaan sampah berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan atau tidak.

Kegiatan evaluasi pengelolaan sampah pada Bank Sampah Induk (BSI) Sahate Kabupaten Pangandaran

yang dilakukan oleh DLHK Kabupaten Pangandaran dilaksanakan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. Evaluasi tersebut merupakan tahapan penilaian dan pengawasan terhadap: jumlah dan jenis sampah yang dilakukan pemilahan, pengumpulan, pemanfaatan kembali, dan/atau pengelolaan; fasilitas Bank Sampah; kondisi lingkungan di sekitar Bank Sampah; dan pelaksanaan tata kelola Bank Sampah. Namun demikian, hasil observasi diperoleh gambaran bahwa evaluasi pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran pada Bank Sampah Induk Sahate Kabupaten Pangandaran sudah dijalankan namun belum maksimal karena masih terdapat beberapa indikator masalah pada kriteria evaluasi, diantaranya:

1. Belum optimalnya hasil dari adanya program Bank Sampah di Kabupaten Pangandaran. Dengan adanya program Bank Sampah, diketahui bahwa hanya sebesar 15% sampah yang telah dikelola sehingga menghasilkan nilai ekonomis, sedangkan target dari Pemerintah Daerah yaitu setidaknya 30% sampah dapat terkelola.
2. Hasil dari adanya pengelolaan sampah melalui Bank Sampah di Kabupaten Pangandaran belum dapat memecahkan permasalahan dalam pengurangan dan penanganan sampah di Kabupaten Pangandaran. Tahun 2022

semester 2, Capaian Timbulan sampah sebanyak 62.523,33 Ton, Pengurangan sampah berhasil mencapai 6.282,75 Ton atau 10,05% dari total timbulan sampah dan untuk penanganan sampah mencapai 19.065,70 ton atau 30,49% dari total timbulan sampah. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa untuk penanganan sampah masih jauh dari target capaian, dimana target capaian sebesar 74% (Sumber data: Data Laporan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Pangandaran).

3. Belum meratanya pengadaan atau pendirian Bank Sampah Unit di setiap desa sebagai tempat atau fasilitas dalam mengelola sampah. Dari 93 Desa di Kabupaten Pangandaran, yang sudah memiliki Bank Sampah Unit hanya 25 Desa dan beberapa sudah tidak aktif lagi.
4. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah. Hal ini terlihat dari jumlah anggota atau nasabah yang aktif dalam pengelolaan sampah melalui Bank Sampah dari 938 orang, sekarang yakni tahun 2023 hanya tinggal menyisakan 438 orang anggota nasabah aktif di seluruh Kabupaten Pangandaran (Sumber data: Daftar

Keanggotaan Bank Sampah Induk Sahate Kabupaten Pangandaran).

Dengan demikian, diperlukan suatu evaluasi kebijakan untuk memastikan apakah kebijakan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sehingga dapat mencapai suatu hasil yang maksimal. Bertumpu dari indikator-indikator masalah yang tertera di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: “Evaluasi Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran (Studi pada Bank Sampah Induk Sahate Kabupaten Pangandaran)”.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pernyataan masalah (*problem statement*) dalam penelitian ini adalah, “evaluasi pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran pada Bank Sampah Induk Sahate Kabupaten Pangandaran sudah dijalankan namun belum maksimal”. Selanjutnya dari pernyataan masalah tersebut, rumusan pertanyaan masalah (*problem question* atau *research question*) adalah sebagai berikut: Bagaimana evaluasi pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran pada Bank Sampah Induk Sahate Kabupaten Pangandaran?

## LANDASAN TEORITIS

Nugroho (2014:711) menyatakan bahwa: “Evaluasi kebijakan biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya”. Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator, karena penggunaan indikator tunggal akan membahayakan, dalam arti hasil penilaiannya dapat bias dari yang sesungguhnya. Indikator atau kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Dunn dalam Nugroho (2014:713) adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas, yaitu berkenaan dengan apakah hasil yang diinginkan telah dicapai.
2. Efisiensi, yaitu berkenaan dengan seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
3. Kecukupan, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah.
4. Pemerataan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
5. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai masyarakat.
6. Ketepatan yaitu yang berhubungan dengan rasionalitas substantif,

karena pertanyaan tentang hal ini tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama.

Dengan mengkaji beberapa kriteria evaluasi dapat diketahui bagaimana pencapaian mengenai pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Pangandaran melalui Bank Sampah. Evaluasi dapat memberikan jawaban apakah pengelolaan sampah berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan atau tidak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan salah satu penelitian dengan jenis penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2017:4) bahwa: "Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati". Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang bermaksud mendeskripsikan hasil penelitian dan berusaha menemukan gambaran menyeluruh mengenai suatu keadaan. Usman & Akbar (2017:22) menyatakan bahwa: "Studi kasus yaitu penelitian yang penelaahannya kepada suatu kasus yang dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail dan komprehensif.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder. Informan pada penelitian ini berjumlah 8 orang. Dalam penelitian ini metode

pengumpulan data yang digunakan peneliti, yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses pengolahan dan analisis data dalam penelitian dilakukan melalui tiga tahapan secara berkesinambungan yang meliputi: "Tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap terakhir adalah tahap penarikan kesimpulan dan memverifikasi" (Sujarweni, 2014:85). Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran. Peneliti melakukan penelitian dengan dimulai dari bulan November 2022 hingga Juni 2023.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Nugroho (2014:713) yang menyatakan bahwa indikator atau kriteria evaluasi adalah sebagai berikut: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Adapun evaluasi pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran pada Bank Sampah Induk Sahate Kabupaten Pangandaran, dapat dibahas sebagai berikut:

### **1. Efektivitas**

#### **a. Pencapaian kebijakan**

Setelah dilakukan penelitian melalui wawancara dan observasi mengenai evaluasi pengelolaan sampah

oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran pada Bank Sampah Induk Sahate Kabupaten Pangandaran melalui kriteria efektivitas dalam indikator pencapaian kebijakan, diperoleh hasil bahwa pemerintah Kabupaten Pangandaran memiliki harapan setidaknya sebesar 30% sampah yang ada di Kabupaten Pangandaran dapat terkelola dengan optimal dan memiliki nilai ekonomis yang dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, namun demikian kenyataan menunjukkan bahwa hasil dari adanya pengelolaan sampah melalui Bank Sampah Induk Sahate masih belum optimal dikarenakan tingkat partisipasi masyarakat masih rendah.

#### **b. Ketercapaian hasil**

Setelah dilakukan penelitian melalui wawancara dan observasi mengenai evaluasi pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran pada Bank Sampah Induk Sahate Kabupaten Pangandaran melalui kriteria efektivitas dalam indikator ketercapaian hasil, diperoleh hasil bahwa ketercapaian hasil dari adanya pengelolaan sampah melalui Bank Sampah di Kabupaten Pangandaran masih belum optimal dan masih harus ditingkatkan karena sekitar 85% sampah masih belum terkelola secara maksimal.

Mustari (2015:232) menyatakan bahwa: Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu

alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan”. Mengacu pada teori tersebut dapat dijelaskan bahwa pada dimensi efektivitas dengan indikator pencapaian kebijakan dan ketercapaian hasil dapat dikatakan belum efektif. Hal ini terlihat dari hasil yang tercapai dari adanya program atau kebijakan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah belum optimal, dimana harapan pemerintah dari adanya program pengelolaan sampah yaitu menjadikan Kabupaten Pangandaran menjadi lingkungan yang tidak ada sampah *Zero Waste* belum terealisasikan.

## **2. Efisiensi**

### **a. Penggunaan anggaran**

Setelah dilakukan penelitian melalui wawancara dan observasi mengenai evaluasi pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran pada Bank Sampah Induk Sahate Kabupaten Pangandaran melalui kriteria efisiensi dalam indikator penggunaan anggaran, diperoleh hasil bahwa penggunaan anggaran untuk kegiatan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah di Kabupaten Pangandaran belum efisien karena anggaran yang tersedia belum mencukupi kebutuhan operasional pengelolaan sampah.

### **b. Penggunaan sumber daya manusia**

Setelah dilakukan penelitian melalui wawancara dan observasi mengenai evaluasi pengelolaan sampah

oleh DLHK Kabupaten Pangandaran pada Bank Sampah Induk Sahate Kabupaten Pangandaran melalui kriteria efisiensi dalam indikator penggunaan sumber daya manusia, diperoleh hasil bahwa penggunaan sumber daya manusia untuk kegiatan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah di Kabupaten Pangandaran sudah efisien.

Meutia (2017:88) menyatakan bahwa: Fokus dari kriteria efisiensi adalah persoalan sumber daya, yakni seberapa banyak sumber daya yang dikeluarkan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan”. Mengacu pada teori tersebut dapat dijelaskan bahwa pada dimensi efisiensi dengan indikator penggunaan anggaran dan penggunaan sumber daya manusia dapat dikatakan belum efisien. Hal ini terlihat dari anggaran yang tersedia atau yang digunakan untuk pengelolaan sampah melalui Bank Sampah di Kabupaten Pangandaran belum mencukupi dengan apa yang dibutuhkan dalam pengadaan kegiatan atau pengimplementasian program tersebut. Selain itu, tidak ada kriteria khusus atau spesifikasi sumber daya manusia yang dijadikan sebagai pengelola sampah karena yang diutamakan adalah karyawan yang rajin dan disiplin.

### **3. Kecukupan**

#### **a. Pencapaian hasil dalam memecahkan masalah**

Setelah dilakukan penelitian melalui wawancara dan observasi mengenai evaluasi pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan Kabupaten Pangandaran pada Bank Sampah Induk Sahate Kabupaten Pangandaran melalui kriteria kecukupan dalam indikator pencapaian hasil dalam memecahkan masalah, diperoleh hasil bahwa kebijakan atau program pengelolaan sampah melalui Bank Sampah di Kabupaten Pangandaran belum dapat memecahkan masalah timbunan sampah yang ada.

#### **b. Ketersediaan anggaran**

Setelah dilakukan penelitian melalui wawancara dan observasi mengenai evaluasi pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran pada Bank Sampah Induk Sahate Kabupaten Pangandaran melalui kriteria kecukupan dalam indikator ketersediaan anggaran, diperoleh hasil bahwa anggaran yang tersedia atau yang teralokasikan untuk kegiatan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah di Kabupaten Pangandaran belum mencukupi kebutuhan dana untuk kegiatan atau program tersebut.

Situmorang (2016:281) menyatakan bahwa: “Evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai manfaat suatu kebijakan”. Mengacu pada teori tersebut dapat dijelaskan bahwa pada dimensi kecukupan dengan indikator

pencapaian hasil dalam memecahkan masalah dan ketersediaan anggaran dapat dikatakan belum mencukupi. Hal ini terlihat dari hasil dari adanya program atau kebijakan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah belum dapat memecahkan masalah persampahan yang ada di Kabupaten Pangandaran. Selain itu, alokasi anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum dapat memenuhi kebutuhan operasional pengelolaan sampah di BSI Sahate Kabupaten Pangandaran.

#### **4. Pemerataan**

##### **a. Kegiatan sosialisasi dan edukasi**

Setelah dilakukan penelitian melalui wawancara dan observasi mengenai evaluasi pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran pada Bank Sampah Induk Sahate Kabupaten Pangandaran melalui kriteria pemerataan dalam indikator kegiatan sosialisasi dan edukasi, diperoleh hasil bahwa kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah melalui Bank Sampah di Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan secara merata dan berkesinambungan dikarenakan adanya keterbatasan dana, waktu, tenaga dan sumber daya manusia sehingga tingkat pemahaman serta kesadaran masyarakat dalam memilah dan menabung sampah pada Bank Sampah Induk Sahate masih rendah.

##### **b. Kepuasan masyarakat**

Setelah dilakukan penelitian melalui wawancara dan observasi mengenai evaluasi pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran pada Bank Sampah Induk Sahate Kabupaten Pangandaran melalui kriteria pemerataan dalam indikator program terdistribusi secara proporsional, diperoleh hasil bahwa program pengelolaan sampah melalui Bank Sampah di Kabupaten Pangandaran belum terdistribusi secara proporsional. Hal ini terlihat dari 93 Desa di Kabupaten Pangandaran, yang sudah memiliki Bank Sampah Unit hanya 25 Desa dan dari jumlah tersebut hanya ada 11 Bank Sampah Unit yang masih aktif menjalankan kegiatan operasional pengelolaan sampah melalui Bank Sampah.

Meutia (2017:88) menyatakan bahwa: Kriteria pemerataan atau ekuitas menganalisis apakah biaya dan manfaat telah didistribusikan secara merata kepada kelompok masyarakat, khususnya kelompok-kelompok sasaran dan penerima manfaat". Mengacu pada teori tersebut dapat dijelaskan bahwa pada dimensi pemerataan dengan indikator kegiatan sosialisasi dan edukasi serta program terdistribusi secara proporsional dapat dikatakan belum merata. Hal ini terlihat dari kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan sampah di Bank Sampah Induk Sahate Kabupaten Pangandaran yang belum dilaksanakan secara berkesinambungan dan



pengadaan Bank Sampah Unit yang belum terdistribusi secara proporsional di setiap desa di Kabupaten Pangandaran.

## **5. Responsivitas**

### **a. Partisipasi masyarakat**

Setelah dilakukan penelitian melalui wawancara dan observasi mengenai evaluasi pengelolaan sampah oleh DLHK Kabupaten Pangandaran pada Bank Sampah Induk Sahate Kabupaten Pangandaran melalui kriteria responsivitas dalam indikator partisipasi masyarakat, diperoleh hasil bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui Bank Sampah di Kabupaten Pangandaran masih rendah.

### **b. Kepuasan masyarakat**

Setelah dilakukan penelitian melalui wawancara dan observasi mengenai evaluasi pengelolaan sampah oleh DLHK Kabupaten Pangandaran pada Bank Sampah Induk Sahate Kabupaten Pangandaran melalui kriteria responsivitas dalam indikator kepuasan masyarakat, diperoleh hasil bahwa tingkat kepuasan masyarakat dengan adanya pengelolaan sampah melalui Bank Sampah di Kabupaten Pangandaran sangat tinggi karena kegiatan atau program tersebut memberikan banyak manfaat.

Winarno (2012:186) menyatakan bahwa: “Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika kebijakan akan

dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan/berupa penolakan”. Mengacu pada teori tersebut dapat dijelaskan bahwa pada dimensi responsivitas dapat dikatakan sudah optimal namun belum sepenuhnya responsif, dimana dari 2 indikator yang dijadikan alat ukur penelitian, terdapat satu indikator yang kurang responsif yakni partisipasi masyarakat. Adapun diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti program pengelolaan sampah melalui Bank Sampah di Kabupaten Pangandaran masih rendah. Namun demikian, tingkat kepuasan masyarakat akan program atau kebijakan tersebut sudah tinggi. Sebagian besar masyarakat merasakan banyak manfaat yang didapat dengan adanya kebijakan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah di Kabupaten Pangandaran, diantaranya: mengurangi timbunan sampah, meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat dengan mengubah sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis, menjadikan lingkungan sekitar bersih dan sehat.

## **6. Ketepatan**

### **a. Kebergunaan program bagi masyarakat**

Setelah dilakukan penelitian melalui wawancara dan observasi mengenai evaluasi pengelolaan sampah oleh DLHK Kabupaten Pangandaran pada Bank Sampah Induk Sahate Kabupaten Pangandaran melalui kriteria ketepatan dalam indikator

kebergunaan program bagi masyarakat, diperoleh hasil bahwa program pengelolaan sampah melalui Bank Sampah di Kabupaten Pangandaran sangat bermanfaat dan memiliki nilai guna yang tinggi bagi masyarakat karena dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan menjadikan lingkungan sekitar menjadi bersih serta sehat.

#### **b. Kebergunaan program bagi pemerintah**

Setelah dilakukan penelitian melalui wawancara dan observasi mengenai evaluasi pengelolaan sampah oleh DLHK Kabupaten Pangandaran pada Bank Sampah Induk Sahate Kabupaten Pangandaran melalui kriteria ketepatan dalam indikator kebergunaan program bagi pemerintah, diperoleh hasil bahwa program pengelolaan sampah melalui Bank Sampah di Kabupaten Pangandaran sangat bermanfaat dan memiliki nilai guna yang tinggi bagi pemerintah karena dapat mengurangi timbunan sampah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Meutia (2017:85) menyatakan bahwa: “Kegiatan evaluasi difokuskan pada nilai dari suatu kebijakan, atau penilaian atas keterpenuhan kepentingan atau manfaat dari keberadaan suatu program”. Mengacu pada teori tersebut dapat dijelaskan bahwa pada dimensi ketepatan dengan indikator kebergunaan program bagi masyarakat dan kebergunaan program bagi pemerintah dapat dikatakan sudah tepat. Hal ini terlihat dari kebergunaan

program pengelolaan sampah melalui Bank Sampah di Kabupaten Pangandaran bagi masyarakat yaitu dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, dimana sampah bisa didaur ulang menjadi barang yang dapat dijual melalui Bank Sampah karena memiliki nilai ekonomis. Sedangkan kebergunaan program pengelolaan sampah melalui Bank Sampah di Kabupaten Pangandaran bagi pemerintah yaitu dapat mengurangi timbunan sampah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh simpulan sebagai berikut: Evaluasi pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran pada Bank Sampah Induk Sahate Kabupaten Pangandaran sudah dijalankan namun belum maksimal. Hal ini terlihat dari rata-rata jawaban informan pada 6 dimensi yang dijadikan alat ukur penelitian, terdapat 5 dari 6 dimensi evaluasi yang masih belum menunjukkan belum optimalnya kegiatan evaluasi, diantaranya dimensi: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas. Pengelolaan sampah melalui Bank Sampah di Kabupaten Pangandaran belum efektif dikarenakan hasil yang tercapai dari adanya program atau kebijakan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah belum optimal serta belum sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah yaitu menjadikan

Kabupaten Pangandaran menjadi lingkungan yang tidak ada sampah *Zero Waste*, pengelolaan sampah melalui Bank Sampah di Kabupaten Pangandaran belum efisien dikarenakan anggaran yang tersedia atau yang digunakan untuk pengelolaan sampah melalui Bank Sampah di Kabupaten Pangandaran belum sesuai atau belum mencukupi dengan apa yang dibutuhkan dalam pengadaan kegiatan atau pengimplementasian program tersebut, pengelolaan sampah melalui Bank Sampah di Kabupaten Pangandaran belum memiliki kecukupan dikarenakan hasil dari adanya program atau kebijakan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah belum dapat memecahkan masalah persampahan dan belum dapat memenuhi kebutuhan operasional, pengelolaan sampah melalui Bank Sampah di Kabupaten Pangandaran belum merata dikarenakan kegiatan sosialisasi dan edukasi belum dilaksanakan secara berkesinambungan dan merata serta belum terdistribusi secara proporsional, serta pengelolaan sampah melalui Bank Sampah di Kabupaten Pangandaran belum memiliki responsivitas yang tinggi, hal ini terlihat dari rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti program pengelolaan sampah melalui Bank Sampah di Kabupaten Pangandaran. Namun demikian, pada dimensi ketepatan dengan indikator kebergunaan program bagi masyarakat dan kebergunaan program bagi

pemerintah dapat dikatakan sudah tepat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Meutia, Intan Fitri. 2017. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke-36. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustari, Nuryanti. 2015. *Pemahaman Kebijakan Publik. Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Leutika Prio.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy. Teori, Manaemen, Dinamik, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Cetakan Ke-5. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.
- Rendy, Mohammad. 2015. Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Kebersihan dan Pertanaman Kota Palu. *e-Jurnal Katalogis*. Volume 3 Nomor 11 Halaman 73-39, ISSN: 2302-2019.

- Situmorang, Chazali H. 2016. *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. Cetakan Pertama. Depok: Social Security Development Institute (SSDI).
- Jambura Edu Biosfer Journal. Volume 4 Nomor 1 Halaman 44-55, e-ISSN: 2656-0526.
- Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Sujarweni, Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Usman, Husaini dan Setiady Akbar. 2017. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Thamrin, Hazairin; Iswan Dunggio, dan Sukirman Rahim. 2022. *Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Gorontalo*.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.